

HALAMAN JUDUL

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA,
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN DAERAH
(Studi Kasus Pada Kabupaten Ketapang)**

**Usulan Skripsi
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S1**

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh:

Mohamad Ali Ma'ruf

Nim:31401506034

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG**

2020

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA,
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN DAERAH
(Studi Kasus Pada Kabupaten Ketapang)**

Disusun oleh :

Mohammad Ali Maruf

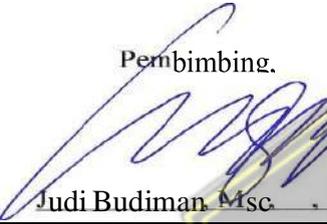
31401506034

Telah dipertahankan didepan penguji

Pada Tanggal 26 Agustus 2022

Susunan Dewan Pen **guji**

Pembimbing,


Judi Budiman, Msc., SE., Akt., CA

NIK : 211403015

Penguji,


Devi Permatasari, SE,MSi,AK,CA

NIK : 211413024

Penguji,


Digitally signed
by Luluk
Muhimatul Ifada
Date: 2021.02.25
16:59:40 +07'00'

Dr. Hj. Luluk Muhimatul Ifada, SE,MSi,Akt

NIK : 210403051

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Ekonomi pada tanggal 26 September 2022

Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Dra. Hj. Winarsih, SE, Msi

NIK. 21141502

ABSTRAK

The purpose of this study was to analyze the competence of human resources, use of technology, and the government's internal control system on the quality of regional financial reports in Ketapang Regency. This type of research is quantitative research using primary data obtained from the results of filling out questionnaires. The sample selected in this research as many as 110 respondents. Analysis of research data using descriptive statistical analysis method and multiple linear analysis with SPSS. The results of the study indicate that this research has succeeded in proving that Utilization of Accounting Information and Accounting Internal Control has a significant influence on Quality Presentation of Regional Financial Reports.

Keyword : *Competence of Human Resources, Utilization of Information Technology, Government Internal Control System, Quality of Regional Financial Reports*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 RumusanMasalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 <i>Grand Theory</i>	10
2.1.1 Teori Entitas.....	10
2.2 Variabel Penelitian.....	10
2.2.1 Laporan Keuangan.....	10
2.2.2 Kompetensi Sumber Daya Manusia	11
2.2.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi.....	13
2.2.4 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	14
2.3 Penelitian Terdahulu	15

2.4 Kerangka Penelitian Teoritis dan Pengembangan Hipotesis	17
2.4.1 Kerangka Penelitian Teoritis	17
2.4.2 Pengembangan Hipotesis.....	18
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	27
3.2 Jenis dan Sumber Data	27
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	28
3.4 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel	29
3.5 Teknik Analisis Data	33
3.5.1 Uji Kualitas Data	34
3.5.2 Analisis Statistik Deskriptif.....	36
3.5.3 Uji Asumsi Klasik	36
3.5.4 Analisis Regresi Linier Berganda	38
3.5.5 Uji Kelayakan Model (Uji <i>Goodness of Fit</i>)	39
DAFTAR PUSTAKA	43
LAMPIRAN	48

DAFTAR TABEL

Tabel 2 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	15
--	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pemikiran Teoritis 18



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dengan adanya tuntutan publik dari tahun ke tahun yang semakin tinggi mengenai penyelenggaraan pemerintah yang baik, bersih, serta bertanggungjawab terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah, maka setiap satuan kerja termasuk pemerintah daerah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan keuangannya secara transparan kepada publik dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang berkualitas.

Laporan keuangan merupakan media bagi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan kinerja keuangannya kepada publik, untuk itu pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Didalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), terdapat Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dijelaskan bahwa laporan keuangan yang berkualitas itu harus memenuhi beberapa karakteristik diantaranya relevan, andal, dan dapat dibandingkan serta dapat dipahami (Erviana, 2017).

Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai suatu alat informasi bagi pihak-pihak di luar pemerintahan. Laporan keuangan juga berisikan informasi mengenai sejarah pemerintahan yang dikuantitatifkan dengan nilai satuan moneter. Kewajaran mengenai informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus memiliki empat kriteria yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), kecukupan

pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern yang baik. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) memiliki empat jenis opini mengenai hasil audit yang telah dilakukannya terhadap LKPD yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (Adverse), dan Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer).

Kualitas laporan keuangan yaitu seberapa besar tingkat kelayakan laporan keuangan tersebut dapat disajikan untuk menunjukkan informasi yang benar, jujur, serta dapat dipertanggungjawabkan. Kualitas laporan keuangan juga berfungsi sebagai suatu dasar pengambilan keputusan ekonomi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini pemerintah sudah seharusnya meningkatkan kualitas laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang dibutuhkan pihak-pihak yang berkepentingan. Peningkatan kualitas laporan keuangan dimaksudkan agar dapat meningkatkan kredibilitas, menyajikan informasi yang lengkap serta sesuai dengan kebutuhan pemakai, dan pada intinya akan dapat mewujudkan transparansi maupun akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Menurut Diani (2014) Kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari karakteristik kualitatif laporan keuangan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan antara lain dapat dipahami (understandability), relevan (relevance), andal (reliability), dan dapat

dibandingkan (comparability). Apabila informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, berarti pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tersebut.

Kompetensi sumber daya manusia (SDM) yaitu sebagai suatu kemampuan sumber daya manusia guna untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh atasan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai sehingga mampu untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang berkualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Wijayanti dan Handayani (2017) dalam hal ini kompetensi memiliki beberapa indikator untuk mengukur tingkat kompetensi sumber daya manusia diantaranya yaitu : Pengetahuan (knowledge), Keterampilan (skill), Sikap (attitude). Sumber daya manusia yang dimaksud dari penelitian ini adalah pegawai negeri sipil yang ada di organisasi pemerintah kabupaten ketapang dimana perannya sangat vital bagi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas.

Pemanfaatan teknologi juga memiliki pengaruh terhadap keterandalan kualitas laporan keuangan. Menurut penelitian Megayanti, Adiputra, dan Sinarwati (2015:10), pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi akan meningkatkan keterandalan pelaporan keuangan daerah. Kualitas laporan keuangan juga sangat tergantung pada pengendalian internal yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah.

Pengertian akuntansi berbasis akrual dalam PP No 71 Tahun 2010 adalah basis akuntansi dimana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan tersebut pada saat terjadinya transaksi, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Komponen laporan keuangan berbasis akrual adalah Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (Najati, Pituringsih dan Animah 2016).

Implementasi akuntansi akrual adalah suatu penerapan atau penggunaan SAP yang berbasis akrual pada organisasi pemerintah daerah, dimana akuntansi akrual dapat menganalisis transaksi secara baik dan dapat diandalkan. Selain itu basis akrual dapat memperlihatkan reliabilitas, relevansi, serta komparabilitas informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan, sehingga dapat dipastikan bahwa informasi telah disajikan secara baik dan benar. Akuntansi berbasis akrual secara signifikan juga dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan kualitas dalam pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien. Menurut Kusuma (2013) Indikator yang digunakan yaitu, integritas/komitmen, kesiapan SDM, kesiapan sarana prasarana, dan kesiapan sistem informasi.

Sistem pengendalian internal pemerintah merupakan suatu langkah nyata pemerintah dalam memberikan acuan serta pijakan bagi pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan secara akuntabel dan transparan. Sistem pengendalian internal pemerintah merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (fraud).

Variabel sistem pengendalian intern diukur dengan 5 indikator menurut COSO yaitu: 1) Lingkungan Pengendalian; 2) Penilaian Resiko; 3) Kegiatan Pengendalian; 4) Informasi dan Komunikasi; 5) Pemantauan (Hakim, 2017).

Pada penelitian ini Kabupaten Ketapang menjadi objek penelitiannya karena selama 4 tahun mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018. Dengan predikat WTP ini membuktikan bahwa transparansi anggaran yang ada di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa dirasakan oleh masyarakat. Predikat WTP juga membuktikan bahwa pemerintah dalam menentukan kebijakan anggaran dianggap mampu melaksanakan sendiri dengan baik. Untuk mempertahankan opini WTP setiap pemerintah daerah dihimbau untuk menyusun LKPD berdasarkan SAP, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan serta memperhatikan tertib administrasi dan pengelolaan mulai dari tingkat desa, serta adanya transparansi terhadap informasi keuangan.

Dengan adanya fenomena tersebut dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah masih jauh dari kriteria karakteristik laporan keuangan yang ditentukan, yaitu keterandalan. Mengingat bahwa keterandalan merupakan unsur penting dalam laporan keuangan pemerintah daerah sebagai dasar pengambilan keputusan. Keterandalan merupakan kemampuan informasi untuk memberikan keyakinan bahwa informasi tersebut dikatakan benar dan valid (Nurillah, 2014). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa keterandalan pelaporan keuangan akan terpenuhi jika informasi laporan keuangan bebas dari

pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi.

Banyak penelitian sebelumnya yang telah dilakukan dan memiliki hasil yang berbeda mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil penelitian dari Wijayanti dan Handayani (2017) mengindikasikan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sedangkan menurut Nurillah (2014) kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Pada penelitian tentang sistem pengendalian internal pemerintah ada perbedaan hasil yang telah dilakukan oleh peneliti. Menurut Widari dan Sutrisno (2017) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah, namun menurut Yensi (2014) sistem pengendalian internal pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari Wijayanti dan Handayani (2017) dengan menambahkan variabel pemanfaatan informasi teknologi dan sistem pengendalian internal pemerintah. Populasi penelitian yang digunakan adalah 26 OPD (Dinas dan Badan) yang ada di Kabupaten Ketapang. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka peneliti mengambil judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan

teknologi informasi, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai kualitas laporan keuangan daerah yang telah dijelaskan pada latar belakang. Maka, penelitian ini mendorong perumusan masalah apa saja yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah. Dari pernyataan tersebut penelitian ini akan menjawab masalah yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah ?
2. Bagaimanakah pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah
3. Bagaimanakah pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan daerah ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
2. Untuk menguji pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah
3. Untuk menguji pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi untuk berbagai pihak diantaranya sebagai berikut:

1.) Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana informasi mengenai perkembangan pengetahuan ilmu di bidang akuntansi yaitu mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan daerah yang saat ini masih banyak kekurangan dalam pelaporan serta pertanggungjawabannya.

2.) Aspek Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan mengenai kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

b. Bagi Organisasi Pemerintah Daerah

Dapat dijadikan bahan masukan serta alternatif mengenai kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan serta sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 *Grand Theory*

2.1.1 Teori Entitas

Menurut Paton (1962) dalam teorinya, bahwa organisasi dianggap sebagai suatu kesatuan atau badan usaha ekonomik yang berdiri sendiri, bertindak atas nama sendiri, dan kedudukannya terpisah dari pemilik atau pihak lain yang menanamkan dana dalam organisasi dan kesatuan ekonomik tersebut menjadi pusat perhatian atau sudut pandang akuntansi. Dari perspektif ini, akuntansi berkepentingan dengan pelaporan keuangan sebagai kesatuan usaha bukan pemilik. Kesatuan usaha merupakan pusat pertanggungjawaban dan laporan keuangan merupakan medium pertanggungjawabannya.

Menurut Wijayanti dan Handayani (2017) dalam mekanisme keuangan negara di Indonesia, teori ataupun konsep entitas telah diaplikasikan. Istilah pelaporan masuk dalam undang-undangan melalui penjelasan dari UU Nomor 1 Tahun 2004 pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi “Tiap-tiap kementerian negara/lembaga merupakan entitas pelaporan yang tidak hanya wajib menyelenggarakan akuntansi, tetapi juga wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

2.2 Variabel Penelitian

2.2.1 Laporan Keuangan

Laporan keuangan bisa dikatakan berkualitas jika informasi yang disajikannya dalam laporan keuangan dapat dipahami, disajikan secara jujur, dapat

mendukung pengambilan keputusan oleh pihak pemakai, dan dapat diandalkan. Tetapi perlu disadari, bahwa laporan keuangan terkadang tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam hal pengambilan keputusan ekonomi, karena banyak hal internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan tersebut.

Menurut Diani (2014) Kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari karakteristik kualitatif laporan keuangan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan antara lain dapat dipahami (understandability), relevan (relevance), andal (reliability), dan dapat dibandingkan (comparability). Apabila informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, berarti pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tersebut.

2.2.2 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi adalah kemampuan seseorang dalam menerapkan dan menunjukan keterampilannya. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan suatu kemampuan yang meliputi tingkat pendidikan, pelatihan, dan mempunyai pengalaman yang cukup dari manusia untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Didalam menjalankan fungsi akuntansi tidak hanya mampu mencatat dan membuat laporan keuangan saja, tetapi juga sangat

diperlukan kemampuan dalam menentukan pilihan perlakuan akuntansi terhadap suatu transaksi, merancang, dan menganalisa.

Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.46A Tahun 2003 kompetensi sumber daya manusia diartikan sebagai sebuah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Pemerintah harus memberikan perhatiannya kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) selaku sumber daya manusia yang menjalankan organisasi sektor publik tersebut. Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang profesional dengan wawasan yang luas tentang bidang akuntansi memiliki jiwa berkompetisi yang sportif. Dengan adanya PNSD yang profesional akan dapat menyelesaikan tugasnya dengan tuntas dengan kompetensi yang dimilikinya juga akan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal. Laporan keuangan yang berkualitas akan terhambat apabila sumber daya manusia tersebut tidak memiliki pengetahuan yang mendalam tentang bidang akuntansi, serta akan menimbulkan pemborosan waktu, bahan, dan tenaga.

Berbeda dibandingkan dengan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan yang luas terhadap bidang akuntansi karena kecakapan dan mampu memahami setiap alur pekerjaan akan mampu membuat laporan keuangan yang berkualitas serta menghemat waktu perkerjaan sehingga hasil kerja sangat efisien. Menurut Diani (2014), kualitas laporan keuangan akan terlihat rendah dikarenakan oleh pengetahuan penyusun itu sendiri. Sumber

Daya Manusia (SDM) yang memiliki pengetahuan dan pemahaman dibidangnya akan mampu menyelesaikan dan menyajikan laporan keuangan dengan tepat waktu. Laporan keuangan yang tersajikan secara cepat tentunya akan semakin baik dalam pengambilan keputusan (Roshanti dkk, 2014).

2.2.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemerintah perlu memfokuskan pada peningkatan teknologi informasi dalam mewujudkan tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Penggunaan teknologi informasi merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi karena untuk membantu pengelolaan data yang cepat, efektif dan efisien.

Saat ini banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah memanfaatkan ataupun menggunakan teknologi informasi dalam menghasilkan suatu sistem informasi, seperti menyediakan informasi mengenai keuangan daerah yang mampu untuk diakses, dikelola dan didaya gunakan oleh pihak dan masyarakat luas. Diani, (2014).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005, sistem Informasi Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SIKD adalah suatu sistem pengadministrasian, pendokumentasian, dan pengolah data keuangan daerah yang disajikan kepada masyarakat dan menjadi sumber informasi bagi pihak yang memerlukan. Dalam menerapkan SIKD mampu memberikan manfaat dalam mempercepat proses kerja dalam pengelolaan keuangan daerah dan cepat dalam menyediakan informasi keuangan daerah yang komprehensif kepada masyarakat luas (Diani, 2015).

2.2.4 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Sistem pengendalian Internal Pemerintah yaitu suatu proses yang integral pada tindakan serta kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan maupun pegawai untuk memberikan suatu keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan dalam kegiatan pemerintah secara efektif dan efisien, serta kualitas laporan keuangan maupun ketaatan terhadap perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan pelaporan keuangan terkadang masih banyak penyimpangan, oleh karena itu perlu adanya sistem pengendalian internal pemerintah untuk diterapkan di dalam suatu pemerintahan guna untuk mengurangi penyimpangan tersebut sehingga nantinya dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik dan berkualitas. Dampak dari pelaksanaan sistem pengendalian pemerintah ini diharapkan terciptanya kinerja yang kondusif serta sejalan dalam hal laporan keuangan.

Menurut Nurillah (2014) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pengendalian intern didefinisikan merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*). Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Dilihat dari tujuan tersebut, maka sistem pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua, yaitu : Pengendalian intern akuntansi dan Pengendalian administratif.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan daerah telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian tersebut mempunyai variabel yang berbeda, dengan hasil penelitian yang berbeda pula. Diantaranya adalah sebagai berikut :

Tabel 2 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Wijayanti dan Handayani (2017)	Variabel independen: Pengaruh Kompetensi SDM dan Implementasi Akuntansi Akrua Variabel dependen: Kualitas Laporan Keuangan	1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kompetensi (SDM) tidak berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. 2. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Implementasi Akuntansi Akrua berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
2.	Nurillah (2014)	Variabel independen: Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Variabel dependen: Kualitas Laporan Keuangan	1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan

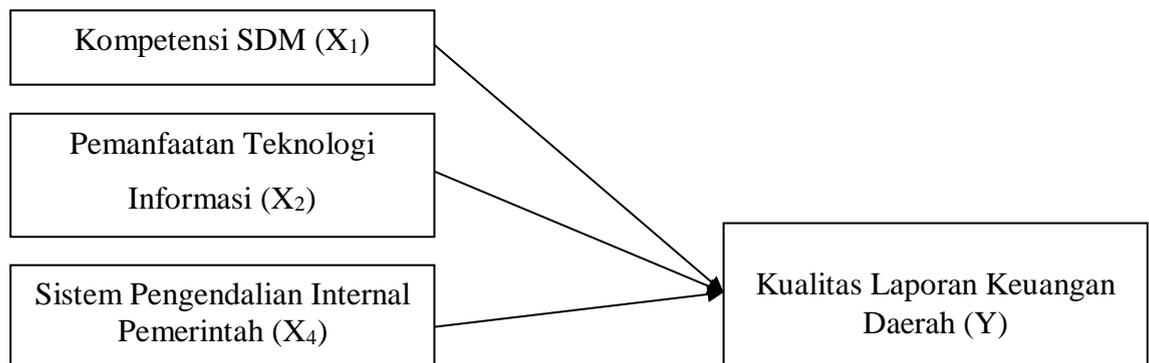
			Pemerintah Daerah.
3.	Widari & Sutrisno (2017)	<p>Variabel independen: Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Komitmen Organisasi</p> <p>Variabel dependen: Kualitas Laporan Keuangan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. 2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komitmen Organisasi memiliki pengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
4.	Erviana (2017)	<p>Variabel independen: Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah dan Kegiatan Pengendalian</p> <p>Variabel dependen: Kualitas Laporan Keuangan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kegiatan Pengendalian berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

5.	Adhitama (2017)	<p>Variabel independen: Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (Sap), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Sakd), Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia</p> <p>Variabel dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</p>	1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
6.	Setiawan dan Gayatri (2017)	<p>Variabel independen: Pengaruh Akuntansi Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Intern Dan Motivasi Kerja</p> <p>Variabel dependen: Kualitas Laporan Keuangan</p>	1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntansi Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Intern Dan Motivasi Kerja berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

2.4 Kerangka Penelitian Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Kerangka Penelitian Teoritis

Kerangka pemikiran teoritis yang menggambarkan hubungan antar variabel dalam penelitian dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1 Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka penelitian diatas menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi suatu kualitas laporan keuangan daerah diantaranya yaitu, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, implementsi akuntansi akreal, dan sistem pengendalian internal pemerintah. Saat ini masyarakat selalu menuntut adanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggungjawab. Oleh karena itu pemerintah daerah diharuskan melaporkan keuangannya dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang berkualitas.

2.4.2 Pengembangan Hipotesis

2.4.2.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas laporan Keuangan Daerah

Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang individu mengenai pengetahuan, ilmu, dan etos dalam berkerja pada suatu entitas maupun pemerintahan serta bagaimana tanggungjawab terhadap apa yang ia kerjakan. Pada pembuatan laporan keuangan daerah apabila sumber daya manusia tidak memiliki standar kompetensi yang baik maka akan mempengaruhi kualitas

laporan keuangan tersebut. Kompetensi sangat dibutuhkan dalam dunia kerja sebagai penunjang pekerjaan, sehingga akan berdampak positif bagi pemerintahan maupun dirinya. Sebagai acuan standar kompetensi suatu sumber daya manusia maka ada tiga indikator kompetensi sumber daya manusia yaitu : pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan sikap (*attitude*).

Pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Nurillah (2014) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian yang pertama yaitu :

H₁ : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

2.4.2.2 Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005, sistem Informasi Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, dan mengolah data pengelolaan keuangan daerah yang disajikan kepada masyarakat dan menjadi sumber informasi bagi pihak yang memerlukan. Dalam menerapkan SIKD mampu memberikan manfaat dalam mempercepat proses kerja dalam pengelolaan keuangan daerah dan cepat dalam penyediaan informasi keuangan daerah yang menyeluruh kepada publik (Diani, 2015).

Teknologi informasi memberikan akses kecepatan dalam pemrosesan informasi, tentu saja hal ini sangat membantu dalam penyajian informasi yang

akurat karena dengan akses yang cepat tersebut mampu memberikan informasi laporan keuangan yang tidak kehilangan nilai informasi dalam ketepatanwaktuan. Pesatnya perkembangan teknologi informasi serta keunggulannya yang secara luas dapat memberikan individu maupun kelompok dalam mendapatkan akses, kelola dan mendayagunakan data informasi keuangan daerah secara akurat dan cepat. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian yang kedua yaitu :

H₂: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah

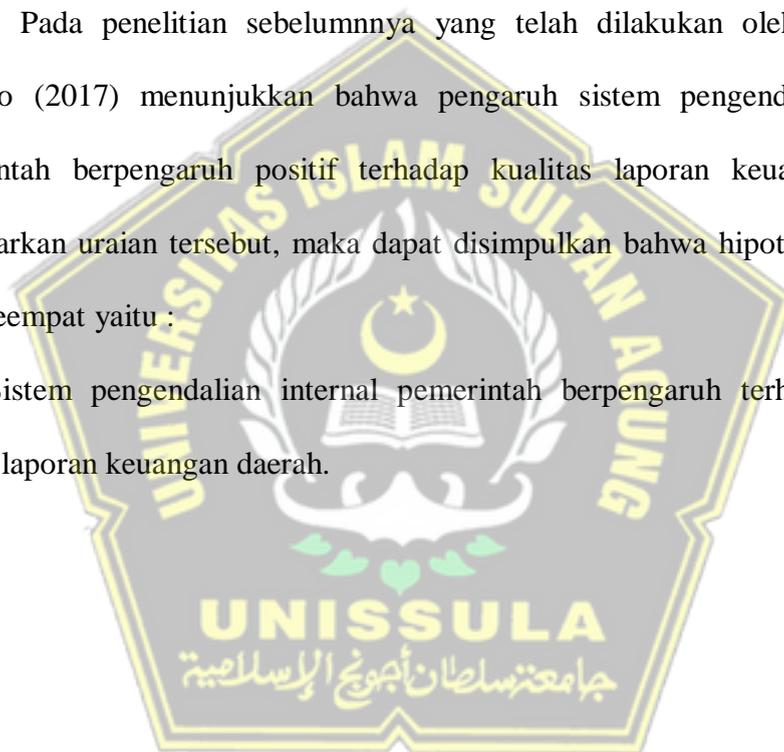
2.4.2.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Tujuan utama dari sistem pengendalian internal pemerintah adalah untuk mengecek ketelitian serta keandalan suatu data akuntansi. Dengan sistem pemhendalian internal pemerintah, risiko mengenai terjadinya kekeliruan, kesalahan dalam pencatatan, maupun perhitungan dapat diminimalisasi sehingga bisa mengurangi kemungkinan pemerintah daerah mengalami kekeliruan terhadap hasil dari laporan keuangan dan ketaatan terhadap perundang-undangan. Sistem pengendalian internal pemerintah sebagai pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berfungsi untuk mengontrol apa yang terjadi di dalamnya. Apabila suatu pengendalian internal telah diterapkan pada suatu entitas pemerintahan maka semua operasi, sumber daya fisik, dan data akan dipantau serta berada di bawah kendali, implikasinya yaitu tujuan akan tercapai dan risiko

menjadi kecil serta informasi yang dihasilkan akan lebih berkualitas. Dengan diterapkannya pengendalian internal dalam sistem akuntansi, maka sistem akuntansi akan menghasilkan informasi akuntansi yang lebih berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Indikator yang digunakan yaitu, lingkungan pengendalian, pemantauan, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, dan informasi & komunikasi.

Pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Widari dan Sutrisno (2017) menunjukkan bahwa pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian yang keempat yaitu :

H₃ : Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3. Metode Penelitian

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Ketapang dengan jumlah 26 OPD. Teknik pengambilan sampel terhadap responden yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *purposive sampling*. Pada metode *purposive sampling* ini digunakan dengan tujuan dan maksud untuk memperoleh sampel yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu.

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, seorang akuntan dan kepala bagian akuntansi yang ada pada satuan OPD. Penentuan unit analisis sampel ini didasarkan pada alasan bahwa seorang akuntan dan kepala bagian akuntansi merupakan pihak yang terlibat langsung secara teknis dalam pencatatan transaksi keuangan dan penyusunan pelaporan keuangan OPD.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Pada data primer diperoleh dari hasil pengisian kuesioner yang berupa pertanyaan atau pernyataan secara terstruktur yang dilakukan oleh responden. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. Data yang diperoleh dari skala likert yaitu berupa data interval.

Menurut Wijayanti dan Handayani (2017) Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Ukuran yang digunakan untuk menilai jawaban-jawaban yang diberikan dalam menguji variabel independen dan variabel dependen yaitu lima tingkatan, bergerak dari satu sampai lima. Untuk pernyataan positif alternatif jawaban, sebagai berikut:

Sangat Setuju (SS) = 5

Setuju (S) = 4

Netral (N) = 3

Tidak Setuju (TS) = 2

Sangat Tidak Setuju (STS) = 1

3.3 Metode Pengumpulan Data

Data yang ada dalam penelitian ini diperoleh melalui survei lapangan, dimana penelitian ini mengambil sampel dari OPD Kabupaten Ketapang dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data. Kuesioner yaitu suatu metode dimana peneliti menyusun daftar pertanyaan atau pernyataan secara tertulis dan kemudian dibagikan kepada responden yang bertujuan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian. Isi kuesioner terdiri atas :

- a) Identitas reponden, yang meliputi nama, jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, jabatan/pangkat, dan nama OPD.
- b) Pertanyaan atau pernyataan mengenai tanggapan responden terhadap variabel yang terdiri dari : kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi

informasi, sistem pengendalian internal pemerintah, dan kualitas laporan keuangan daerah.

3.4 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

3.4.1 Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Kualitas laporan keuangan daerah adalah laporan keuangan yang dapat menjelaskan empat karakteristik kualitatif laporan keuangan (andal, relevan, dapat dipahami dan dapat dibandingkan). Tujuan laporan keuangan melalui penyajian informasi akuntansi diwujudkan melalui ukuran-ukuran normatif karakteristik laporan keuangan tersebut. Kualitas informasi laporan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dapat diukur dengan menggunakan skala likert dengan beberapa indikator, yakni : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disajikan secara relevan, andal, dapat dipahami, dapat dibandingkan, serta sesuai dengan pedoman penyusunan laporan keuangan daerah (Evicahyani dan Setiawina, 2016).

Responden diminta untuk menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap 15 pertanyaan pada variabel kualitas laporan keuangan daerah yang diajukan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya berdasarkan sumber kuesioner dari Sudiarinti (2015).

3.4.2 Kompetensi SDM

Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakannya

tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. Indikator dalam variabel ini, yaitu : pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan sikap (*attitude*) (Wijayanti dan Handayani, 2017).

Responden diminta untuk menyatakan setuju atau ketidak setujuannya terhadap 15 pertanyaan pada variabel kompetensi sumber daya manusia yang diajukan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya berdasarkan sumber kuesioner dari Sudiarinti (2015).

3.4.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi yang semakin berkembang akan memudahkan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah komputer dan jaringan internet. Variabel ini diukur dengan menggunakan 9item pertanyaan yang berkaitan dengan ketersediaan komputer dan jaringan internet dalam melaksanakan tugas pekerjaan dan sudah digunakan (perangkat), jaringan internet yang terpasang dan dimanfaatkan dengan baik, proses pengelolaan keuangan dan akuntansi dilakukan secara komputerisasi (pengelolaan data keuangan), adanya software pendukung, serta adanya jadwal pemeliharaan peralatan (perawatan).

Responden diminta untuk menyatakan setuju atau ketidak setujuannya terhadap 15 pertanyaan pada variabel pemanfaatan teknologi informasi yang diajukan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya berdasarkan sumber kuesioner dari (Indriasari & Nahartyo, 2016).

3.4.4 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*). Variabel sistem pengendalian intern diukur dengan 5 indikator menurut COSO yaitu: 1) Lingkungan Pengendalian; 2) Penilaian Resiko; 3) Kegiatan Pengendalian; 4) Informasi dan Komunikasi; 5) Pemantauan (Hakim, 2017).

Responden diminta untuk menyatakan setuju atau ketidak setujuannya terhadap 15 pertanyaan pada variabel sistem pengendalian internal pemerintah yang diajukan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya berdasarkan sumber kuesioner dari Sudiarinti (2015).

Tabel 3.1
Pengukuran Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala Pengukuran
1. Kompetensi SDM	Pengetahuan (<i>Knowledge</i>)	a. Memiliki pengetahuan di bidang ilmu akuntansi. b. Mengetahui cara membuat laporan keuangan yang baik dan benar.	Skala Likert
	Keterampilan (<i>Skill</i>)	a. Mampu menguasai di bidangnya yaitu seorang akuntan. b. Memiliki etos kerja yang bagus.	
	Sikap (<i>Attitude</i>)	a. Mampu bersikap baik terhadap atasan maupun sesama karyawan.	
2. Pemanfaatan	Perangkat	1. Jaringan internet terpasang dan berfungsi 2. Pemanfaatan jaringan internet	Skala Likert

Teknologi Informasi		3. Komputer cukup Memadai	
	Pengelolaan data keuangan	1. Pedoman dan prosedur pemanfaatan teknologi 2. Pemanfaatan aplikasi sesuai dengan kebutuhan 3. Komputerisasi proses akuntansi 4. Integrasi system informasi dan laporan Managerial	Skala Likert
	Perawatan	1. Pemeliharaan peralatan teknologi informasi 2. Pendataan peralatan dan waktu perbaikan	Skala Likert
3. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Lingkungan pengendalian	a. Menetapkan aturan mengenai perilaku dan standar etika pegawai. b. Memiliki standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam instansi.	Skala Likert
	Penilaian risiko	a. Melakukan analisis risiko secara lengkap dan menyeluruh terhadap kemungkinan timbulnya pelanggaran terhadap sistem akuntansi.	Skala Likert
	Pemantauan	a. Melakukan pemantauan setiap hasil temuan/ revidu dan saran yang diberikan oleh BPK/Inspektorat.	Skala Likert
	Kegiatan pengendalian	a. Instansi Pemerintah mengembangkan rencana untuk identifikasi dan pengamanan aset infrastuktur.	Skala Likert
	Informasi dan komunikasi	a. Mampu melakukan saluran komunikasi berkelanjutan yang dilaksanakan secara terbuka dan efektif dengan masyarakat, rekanan, dan aparat pengawas intern dalam memberikan masukan signifikan.	Skala Likert
4. Kualitas Laporan Keuangan	Relevan	a. Mampu menyajikan laporan keuangan sesuai SAP. b. Mampu menghasilkan laporan	Skala Likert

Daerah		keuangan yang dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksi kejadian masa yang akan datang.	
	Andal	a. Menyajikan laporan keuangan secara baik dan benar. b. Menyajikan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan bagi para pengguna.	Skala Likert
	Dapat dibandingkan	a. Mampu membuat laporan keuangan dan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya. b. Membuat laporan keuangan sesuai SAP.	Skala Likert
	Dapat dipahami	a. Menyajikan laporan keuangan yang mudah dipahami dan dimengerti. b. Menyusun laporan keuangan secara sistematis.	Skala Likert

3.5 Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis kuantitatif. Dalam suatu penelitian kuantitatif, analisis data merupakan suatu kegiatan dimana setelah semua data dari seluruh responden terkumpul. Menurut Hapsari (dalam Sugiyono, 2012:142) kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.

Untuk membantu dalam menganalisis pengaruh kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan daerah, penelitian ini menggunakan program

aplikasi *Statistical Package for Social Science* (SPSS). Teknik analisis statistika yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda.

3.5.1 Uji Kualitas Data

3.5.1.1 Uji Validitas

Menurut Ghozali (2013:52) Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut, jadi validitas ingin mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang sudah kita buat betul-betul dapat mengukur apa yang hendak kita ukur. Pengukuran validitas dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu sebagai berikut :

- a. Melakukan korelasi antra skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel.
- b. Uji validitas dapat juga dilakukan dengan melakukan korelasi bivariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk.
- c. Uji dengan Confirmatory Factor Analysis (CFA).

Menurut Sugiyono (2012:228) Teknik korelasi ini digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila daata kedua variabel berbentuk interval atau ratio, dan sumber data dari dua variabel atau lebih tersebut adalah sama. Korelasi ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus Product Moment Pearson, sebagai berikut :

$$r = \frac{N(\sum XY) - (\sum X \sum Y)}{\sqrt{N\sum X^2 - (\sum X)^2} [N\sum Y^2 - (\sum Y)^2]}$$

Keterangan :

r = Koefisien korelasi *product moment*

N = Jumlah responden

X = Skor untuk masing-masing item pernyataan

Y = Jumlah skor keseluruhan dari seluruh item pernyataan untuk masing-masing responden.

3.5.1.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu koefisien yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2013:47). Ada dua cara pengukuran yaitu sebagai berikut :

1. *Repeated measure* atau pengukuran ulang : disini seseorang akan disodori pertanyaan yang sama pada waktu yang berbeda, kemudian dilihat apakah ia tetap konsisten dengan jawabannya.
2. *One shot* atau pengukuran sekali saja : disini pengukurannya hanya sekali dan kemudian dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji *cronbach alpha*(α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha $> 0,70$. Menurut Ghozali (2013:48) Untuk menguji reliabilitas kuesioner digunakan teknik *Cronbach Alpha*, yang dapat diformulasikan dengan rumus sebagai berikut :

$$r_{ii} = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_1^2} \right)$$

Keterangan :

r = Reliabilitas instrumen

k = Banyak butir pertanyaan

$\sum \sigma_b^2$ = Jumlah varians butir

σ_1^2 = Varians Total

3.5.2 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai susunan responden. Berdasarkan data yang diperoleh, untuk melakukan analisis statistik secara deskriptif nantinya menggunakan cara menghitung nilai mean, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum. Statistik deskriptif tersebut kemudian akan dilakukan analisis, analisis deskriptif tersebut meliputi analisis atas hasil perhitungan distribusi statistik untuk kemudian diinterpretasi dengan mengacu pada interpretasi skor.

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diolah adalah sah (tidak ada penyimpangan) atau tidak serta distribusi normal, maka data tersebut akan diuji melalui uji asumsi klasik.

3.5.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah yang mempunyai distribusi normal atau mendekati normal (Ghozali,

2013:154). Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan tiga metode yaitu teknik Kolmogorov Smirnov (K-S), Histogram, dan *Normal Probability Plot*. Normalitas dapat dideteksi dengan teknik K-S yaitu variabel penelitian harus memenuhi nilai signifikansi lebih 0,05, juga dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusannya menurut Ghozali (2013:156) seperti di bawah ini :

1. Model regresi memenuhi asumsi normalitas jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram menunjukkan pola distribusi normal.
2. Model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal.

3.5.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel tersebut tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2013:103).

Untuk menguji ada tidaknya multikolinearitas dalam suatu model regresi salah satunya adalah dengan melihat nilai *tolerance* dan lawannya, serta *Variance Inflation Factor (VIF)*. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen

manakah yang dijelaskan oleh variabel lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai *VIF* tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$) dan menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Bila nilai *tolerance* > 0.10 atau sama dengan nilai *VIF* < 10 , berarti tidak ada multikolinieritas antar variabel dalam model regresi (Ghozali, 2013:103).

3.5.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika *variance* dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka terjadi homoskedastisitas dan apabila berbeda maka terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013:134).

3.5.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Ghozali (2013:96) analisis regresi digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik regresi berganda karena teknik ini bermanfaat untuk mengetahui pengaruh tiap variabel independen terhadap variabel dependen. Model persamaan analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kualitas Laporan Keuangan Daerah

α = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi Kompetensi SDM

β_2 = Koefisien Pemanfaatan Teknologi Informasi

β_3 = Koefisien regresi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

X1 = Variabel Kompetensi SDM

X2 = Variabel pemanfaatan Teknologi Informasi

X3 = Variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

e = *Error*

3.5.5 Uji Kelayakan Model (Uji *Goodness of Fit*)

Uji *Goodness of Fit* atau uji kelayakan model digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual. Secara statistik uji *Goodness of Fit* dapat dilakukan melalui pengukuran nilai koefisien determinasi dan nilai statistik F. Menurut Ghozali (2013), perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_0 ditolak). Sebaliknya perhitungan statistik disebut tidak signifikan apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_0 diterima.

3.5.5.1 Uji Pengaruh Simultan (*F test*)

Uji pengaruh simultan (uji F) digunakan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan sudah tepat dan menunjukkan apakah variabel independen secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan secara bersama-sama atau

tidak dengan variabel dependen (Ghozali, 2016:96). Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji dua arah dengan hipotesis sebagai berikut :

$H_0 : \beta_1 \text{ s/d } \beta_3 = 0$, berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antar variabel independen (kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal pemerintah) terhadap variabel dependen (kualitas laporan keuangan daerah).

$H_a : \beta_1 \text{ s/d } \beta_3 > 0$, berarti ada pengaruh yang signifikan antar variabel independen (kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal pemerintah) terhadap variabel dependen (kualitas laporan keuangan daerah).

Tingkat signifikansi *F test* sebesar 0.05 ($\alpha = 5\%$) serta dapat dihitung dengan rumus :

$$F_{hitung} = \frac{(R^2 - 1)(k - 1)}{(1 - R^2)(n - k)}$$

Sumber (Ghozali, 2016:106)

Dimana :

R^2 : Koefisien determinasi

$1 - R^2$: *Residual Sum of Squares*

k : Jumlah Variabel

n : Jumlah Sampel Observasi (data)

3.5.5.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2016:95), koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang

kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

3.5.5.3 Uji Statistik t (*t test*)

Uji *t-test* pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016:99).

$H_{01} : \beta \leq 0$, artinya kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

$H_{a1} : \beta > 0$, artinya kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

$H_{02} : \beta \leq 0$, artinya pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan kkeuangan daerah.

$H_{a2} : \beta > 0$, artinya pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

$H_{03} : \beta \leq 0$, artinya sistem pengendalian internal pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

$H_{a3} : \beta > 0$, artinya sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Tingkat kepercayaan yang digunakan 95% atau taraf signifikan 5%, dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ dan koefisien regresi searah dengan hipotesis, maka hipotesis diterima. Variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ dan koefisien regresi tidak searah dengan hipotesis, maka hipotesis ditolak. Variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Respon Rate

Bab ini menyajikan analisis data tentang tingkat respons, analisis keandalan, dan informasi latar belakang responden. Bab ini juga mencakup analisis data tentang dampak TIK, audit internal, dan terhadap laporan pengelolaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Ketapang.

Penelitian ini mengambil sampel pegawai di 26 OPD yang ada di Kabupaten Ketapang sebagai peserta penelitian. Sebanyak 130 berkas kuesioner didistribusikan. Namun, setelah proses pengumpulan data, penelitian mengumpulkan 110 kuesioner yang sudah diisi penuh. Ini menunjukkan bahwa tingkat respon untuk penelitian ini adalah 84,62%. Tabel 4.1 di bawah ini adalah ringkasan dari tingkat respons:

Tabel 4.1

Perincian sampel penelitian

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang didistribusikan	130
Kuesioner yang tidak kembali	(16)
Kuesioner tidak terisi lengkap	(4)
Kuesioner yang layak digunakan	110
<i>Respon rate</i>	84,62%

Sumber : Penyebaran dan pengembalian kuesioner

Sebanyak 110 kuesioner atau dengan respon rate sebanyak 84,62% dari total kuesioner dapat kembali dan dengan jawaban yang lengkap. Dengan demikian



DAFTAR PUSTAKA

- Adhitama, Surya.2017.“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (Sap), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Sakd), Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten Ogan Ilir).”
- Diani, Dian Irma.2014.“Pengaruh Pemahaman Akuntansi,Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kota Pariaman).”
- Erviana.2017.“Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Dan Kegiatan Pengendalian Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Survey Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Palu).” *E Jurnal Katalogis, Vol. 5 No. 4.*
- Evicahyani, Sagung Inten, dan Nyoman Djinar Setiawina.2016.“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan.” *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.*
- Ghozali, Imam.2013.*Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam.2016.*Aplikasi Analisis Dengan Program SPSS IBM SPSS 23.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hakim, Abdul.2017.“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Sakd) Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Indragiri Hulu).” *JOM Fekon Vol. 4 No. 1.*

Hapsari, Bano Dwi.2016“Anteseden Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya.”

Kesuma, Desmaria Puji, Choirul Anwar, dan Darmansyah.2017.“Pengaruh Good Governance, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pada Satuan Kerja Kementerian Pariwisata.” *Jurnal Ilmiah WIDYA Ekonomika.*

Kusuma, Ririz Setiawati.2013.“Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua (Kasus pada Pemerintah Kabupaten Jember).”

Najati, Ida, Endar Pituringsih, dan Animah.2016.“Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua : Pengujian Determinan Dan Implikasinya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.” *Jurnal Akuntansi Universitas Jember.*

Nurillah, As Syifa.2014.“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Sakd), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok).” *Diponegoro Journal Of Accounting*.

Paton, W A.1962.*Accounting Theory*. Scholar Book Company.

Setiawan, I Wayan Nico, dan Gayatri.2017.“Pengaruh Akuntansi Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Intern Dan Motivasi Kerja Pada Kualitas Laporan Keuangan.” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.

Sugiyono.2012.*Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta CV .

Widari, Liziana, dan Sutrisno.2017.“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*.

Wijayanti, Ratna, dan Nur Handayani.2017.“Pengaruh Kompetensi SDM Dan Implementasi Akuntansi Akrua Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.” *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.

Yensi, Desy Sefri.2014.“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Sistem Pengendalian Intern (Internal Audit) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi).” *Jom Fekon Vol. 1*.